

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP WARGA SIPIL
DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DARI
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PENGEBOMAN DI GHOUTA TIMUR SURIAH)**

Oleh

Lukas Norman Kbarek, NIM 1614101119

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, dalam kasus pengeboman Ghouta Timur Suriah, serta untuk menganalisis dan memahami pertanggungjawaban yang wajib diberikan oleh pemerintah Suriah kepada warga sipil akibat pengeboman di Ghouta Timur Suriah jika dikaji dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan juga tersier sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga sipil dalam konflik bersenjata non internasional seperti yang terjadi di Suriah seharusnya dilindungi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah dalam kasus pengeboman yang dilakukan di Ghouta Timur ini telah melanggar ketentuan Pasal 3, 14, 17, 18, 24, 53, Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil, Pasal 7, 13, 2, 14, 16, Protokol Tambahan II 1977 tentang Konflik Bersenjata Non Internasional, Aturan 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53-55, 70-84, 86-105, dan 131 Hukum Humaniter Kebiasaan, Serta Pasal 1, 3, 25 Ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Untuk itu selanjutnya berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Negara Suriah harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada korban, merawat semua yang luka, sakit dan korban karam, memberikan jaminan perlindungan dan kesehatan serta perawatan, mengumpulkan semua korban meninggal dalam kasus ini untuk dimakamkan secara manusiawi atau dikembalikan kepada pihak keluarga, dan pemerintah Suriah dalam hal ini sebagai negara harus melakukan penuntutan pidana kepada aktor-aktor dari pengebomana ini, yang menyebabkan pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Warga Sipil, Konflik Bersenjata Non Internasional

*STATE RESPONSIBILITIES FOR CIVILIANS IN NON INTERNATIONAL ARMED
CONFLICTS FROM INTERNATIONAL HUMANITARY LAW PERSPECTIVES
(CASE STUDY: BOMBING IN GHOUTA TIMUR SURIAH)*

By

Lukas Norman Kbarek, NIM 1614101119

Law

Abstract

This Study is conducted with the purpose of finding out and analyzing the violations committed by the Syrian government in the bombing case in Syria's East Ghouta, and to analyze and understand the responsibility that the Syrian government must render to civilians for the bombing in Syria's East Ghouta, according to an International Humanitarian Law perspective. This study uses normative legal research with the statutory, case and conceptual approaches. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials as the basis for analyze to get the relevant conclusion of this case. From this research, it can be proven that civilians in non-international armed conflicts such as those in Syria should be protected. The violations committed by the Syrian Government in the bombing case carried out in East Ghouta violated the provisions of Article 3, 14, 17, 18, 24, 53, Geneva Convention IV 1949 concerning Protection of Civilians, Articles 7, 13, 2, 14, 16 , 1977 Additional Protocol II on Non International Armed Conflicts, Rules 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53-55, 70-84, 86-105, and 131 Customary International Humanitarian Law, and Articles 1, 3, 25 Paragraph (1) and (2) Universal Declaration of Human Rights. For this reason, according to International Humanitarian Law, the Syrian State must be responsible for providing compensation to victims, caring for all those injured, sick and sunk, providing guarantees for protection and health and care, gathering all the dead in this case to be buried humanely or returned to the family, and the Syrian government in this case as a state must carry out criminal prosecutions to the actors of this bombing, which caused violations and crimes against humanity.

Keywords: Responsibility, Civilians, Non-International Armed Conflict